YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i1.8811

REGULASI PARIWISATA DAN RESPON MASYARAKAT BALI: ANALISIS *DOXEY IRRITATION INDEX*

Tourism Regulation and Balinese Community Response: An Analysis of the Doxey Irritation Index

Ni Wayan Amanda Putri Wijaya
Universitas Udayana
amandaputriwijayaa@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 3, 2025	Dec 28, 2025	Jan 9, 2026	Jan 14, 2026

Abstract

The rapid growth of tourism in Bali over the past decade has generated increasingly significant physical, social, and ecological pressures, as reflected in the surge of international tourist arrivals reaching 6.3 million in 2024 with a projected 6.5 million in 2025. This phenomenon aligns with the concept of overtourism, whereby tourist numbers exceed the destination's carrying capacity, as evidenced by waste generation of approximately 3,436 tons per day and a vehicle population of 5.2 million units that surpasses the capacity of regional infrastructure. This study aimed to analyze community responses to these dynamics and to evaluate the effectiveness of government regulations by applying the Doxey Irritation Index framework to communities in Bali. A descriptive qualitative method was employed using literature-based analysis and in-depth interviews. The findings show that at the euphoria stage, the community continues to welcome tourists positively due to the creation of numerous local employment opportunities and increased economic activity. At the apathy stage, the community begins to perceive environmental pressures and recognizes weaknesses in regulations addressing these pressures. Entering the annoyance stage, the intensity of tourist flows becomes more burdensome, and people

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

start to lose private space as a consequence of policies that redistribute tourists to specific areas. At the antagonism stage, tourists are perceived as the primary source of environmental problems, while the government is viewed as having lost legitimacy in tourism governance. These findings indicate that weak policy integration, limited enforcement, and uncontrolled tourism growth are driving Bali's shift from euphoria toward antagonism, thereby underscoring the need to reformulate tourism policies that are more responsive to social dynamics and regional carrying capacity in order to safeguard the sustainability of tourism in Bali.

Keywords: Tourism Regulation; Doxey Irritation Index; Overtourism; Balinese Society; Tourism Sustainability

Abstrak: Pertumbuhan pariwisata Bali yang sangat cepat dalam satu dekade terakhir telah menciptakan tekanan fisik, sosial, dan ekologis yang semakin signifikan, tercermin dari lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 6,3 juta orang pada tahun 2024 dengan proyeksi 6,5 juta pada tahun 2025. Fenomena ini sejalan dengan konsep *overtourism*, ketika jumlah wisatawan melampaui daya dukung destinasi, yang antara lain tampak pada timbulan sampah ± 3.436 ton per hari dan populasi kendaraan 5,2 juta unit yang melampaui daya dukung infrastruktur wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons masyarakat terhadap dinamika tersebut serta mengevaluasi efektivitas regulasi pemerintah dengan menggunakan kerangka *Doxey Irritation Index* pada masyarakat di Bali. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis berbasis studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap *euphoria* masyarakat masih menyambut positif kedatangan wisatawan karena terciptanya banyak lapangan kerja bagi tenaga lokal dan meningkatnya pergerakan roda ekonomi. Pada tahap *apathy*, masyarakat mulai merasakan tekanan lingkungan dan melihat lemahnya regulasi dalam menangani tekanan tersebut. Memasuki tahap *annoyance*, tekanan arus wisatawan semakin terasa dan masyarakat mulai kehilangan ruang privat akibat kebijakan pemerataan wisatawan pada titik-titik tertentu. Pada tahap *antagonism*, wisatawan dipandang sebagai akar utama permasalahan lingkungan, sementara pemerintah dianggap kehilangan legitimasi dalam tata kelola pariwisata. Temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan integrasi kebijakan, minimnya pengawasan, dan pertumbuhan wisata yang tidak terkendali mendorong pergeseran Bali dari tahap *euphoria* menuju *antagonism*, sehingga menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pariwisata yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan daya dukung wilayah agar keberlanjutan pariwisata Bali dapat terjaga.

Kata Kunci: Regulasi Pariwisata; *Doxey Irritation Index*; *Overtourism*; Masyarakat Bali; Keberlanjutan Pariwisata

PENDAHULUAN

Bali merupakan destinasi pariwisata terbesar di Indonesia dan salah satu yang paling terkenal di dunia. Pertumbuhan wisatawan yang sangat pesat, terutama sebelum masa pandemi, menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi Bali, memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah kabupaten (Adnyana, 2023). Kondisi ini sejalan dengan karakteristik destinasi yang

mengalami *tourism growth dependency*, yaitu ketergantungan kuat pada sektor wisata untuk menopang pembangunan daerah (Koens et al., 2018).

Data statistik menunjukkan lonjakan jumlah wisatawan yang terus meningkat setelah dampak pandemi COVID-19 berkurang. Pada tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 6,3 juta orang, melonjak 20,1% dibandingkan tahun sebelumnya menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali bahkan menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,5 juta orang pada 2025. Selain itu, hingga pertengahan 2025 tercatat kenaikan kunjungan turis asing sekitar 16,74%, sedangkan wisatawan domestik meningkat 18,85%, menunjukkan pulihnya industri pariwisata dan kembali tingginya mobilitas wisatawan hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui wawancara bersama Antara News (K. Winata, 2025).

Namun pertumbuhan tersebut juga menimbulkan persoalan serius. *Overtourism* muncul ketika jumlah wisatawan tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan, infrastruktur, dan sosial masyarakat Fenomena ini semakin diperburuk oleh lemahnya regulasi yang tidak mampu mengimbangi kecepatan perubahan lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata Bali masih menghadapi fragmentasi kewenangan, ketidaksinkronan regulasi, dan lemahnya penegakan aturan. Meskipun tersedia instrumen hukum seperti UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, implementasi di lapangan masih lemah dan pengawasan terhadap pelaku industri sering kurang efektif, sehingga aspek lingkungan dan kearifan lokal sering diabaikan oleh pelaku usaha (Sihombing, 2024). Selain itu, pengaturan pariwisata daerah masih dirasakan kurang tegas dalam pengawasan dan pemberian sanksi, serta partisipasi masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan masih rendah (Qodriyatun, 2019).

Pemerintah Indonesia dan pemangku kebijakan Bali telah mencoba memperkenalkan sejumlah aturan untuk mengendalikan dampak pariwisata. Misalnya, pada 2024 diberlakukan pungutan wisatawan atau *tourist levy* sebesar Rp150.000 per orang yang dimaksudkan untuk mendanai pelestarian budaya dan lingkungan, hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No.6 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Bali wajib membayar Levy bagi Wisatawan Asing. Namun dalam praktiknya, hanya sebagian kecil wisatawan yang membayar pungutan ini, sehingga efektifitasnya dalam

mengelola dampak pariwisata masih dipertanyakan, realisasi pungutan wisatawan asing di Bali tercatat Rp117 miliar hingga Juni 2024, dengan sekitar 40% wisatawan yang telah membayar levy, sementara masih ada persentase besar wisatawan yang belum membayar (K. Winata, 2025).

Untuk memahami respon masyarakat terhadap dinamika ini, *Doxey Irritation Index* menjadi kerangka teoritis yang relevan. Model ini menjelaskan perubahan sikap masyarakat terhadap wisatawan dari tahap *euphoria, apathy, annoyance,* hingga *antagonism.* Perubahan sikap tersebut biasanya mencerminkan adanya tekanan yang semakin meningkat akibat aktivitas pariwisata. Pertumbuhan wisatawan yang pesat memicu ketegangan budaya, tekanan lingkungan, dan berubahnya dinamika sosial masyarakat lokal, sehingga kehidupan sehari-hari penduduk terpengaruh oleh isu seperti kerumunan dan komodifikasi budaya. Selain itu terdapat penelitian di Desa Adat Canggu yang menunjukkan bahwa, walaupun masyarakat merasakan manfaat ekonomi, kekhawatiran terhadap perubahan lahan, kemacetan, dan polusi juga meningkat, yang mencerminkan respon sosial terhadap dampak negatif pariwisata (Prabawa et al., 2025). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis respons masyarakat terhadap dinamika tersebut serta mengevaluasi efektivitas regulasi pemerintah yang ada dengan menggunakan kerangka Doxey's Irritation Index terhadap Masyarakat di Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam regulasi pariwisata serta respon sosial masyarakat Bali melalui perspektif Doxey Irritation Index. Pendekatan ini dipilih, sesuai menurut (Sugiyono, 2019), karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap perkembangan pariwisata dan penerapan regulasi yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pariwisata, kebijakan pemerintah daerah, laporan resmi instansi terkait, serta artikel ilmiah dan portal berita resmi yang relevan dengan dinamika pariwisata di Bali. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali keluhan, persepsi, dan bentuk respon masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang secara langsung terdampak oleh konsentrasi wisatawan pada titik-titik tertentu, seperti kawasan perkotaan dan destinasi wisata padat kunjungan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Bali dengan fokus Kota Denpasar, mengingat wilayah ini merupakan pusat aktivitas pariwisata sekaligus area dengan intensitas interaksi tinggi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu 1 Oktober hingga 1 Desember 2025. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria masyarakat lokal, pelaku usaha kecil, serta pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan dan aktivitas pariwisata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pencatatan lapangan, serta dokumentasi dari sumber tertulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tahapan respon masyarakat dalam *Doxey Irritation Index* (euphoria, apathy, irritation, dan antagonism), sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai efektivitas regulasi pariwisata serta dinamika respon sosial masyarakat Bali terhadap perkembangan sektor pariwisata.

HASIL

Berdasarkan hasil studi literatur, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh konsentrasi wisatawan di Provinsi Bali terutama di Kota Denpasar dan kawasan penyangga pariwisata Bali, penelitian ini menunjukkan bahwa respon sosial masyarakat Bali terhadap regulasi dan perkembangan pariwisata dapat dianalisis secara sistematis melalui empat tahapan *Doxey Irritation Index*, yaitu *euphoria, apathy, annoyance,* dan *antagonism*. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pergeseran sikap masyarakat yang bersifat gradual, seiring meningkatnya intensitas kunjungan wisatawan dan lemahnya pengendalian regulasi berbasis daya dukung lingkungan dan sosial.

1. Tahap *Euphoria*

Pada tahap *euphoria*, masyarakat Bali pada awal perkembangan pariwisata menunjukkan sikap terbuka dan antusias terhadap kehadiran wisatawan. Pariwisata dipersepsikan sebagai sumber kesejahteraan dan peluang ekonomi baru, terutama melalui penciptaan lapangan kerja di sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan industri kreatif. Kebijakan pemerintah pada fase ini bersifat promotif, seperti penguatan tenaga kerja lokal melalui *Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2019* dan *Pergub Bali No. 28 Tahun 2020*. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimisme tersebut tidak diimbangi dengan regulasi pembatasan kunjungan dan pengendalian kapasitas lingkungan. Lemahnya fondasi perencanaan ini menjadi cikal bakal munculnya overtourism di tahun-tahun berikutnya,

khususnya di kawasan Ubud dan Kuta yang mengalami pertumbuhan kunjungan tanpa pengaturan ruang yang memadai.

2. Tahap *Apathy*

Memasuki tahap *apathy*, pariwisata telah menjadi aktivitas yang terinstitusionalisasi dan rutin. Hubungan antara masyarakat dan wisatawan cenderung berubah menjadi transaksional, di mana wisatawan dipandang sebagai sumber ekonomi semata. Hasil wawancara dengan Putu Fendi (31 Oktober 2025) mengungkapkan bahwa masyarakat mulai mempertanyakan dominasi wisatawan asing dalam sektor ekonomi lokal:

"Seharusnya pemerintah sudah berani mengeluarkan kebijakan yang tegas, karena sekarang banyak wisatawan asing yang bukan hanya berlibur, tetapi bekerja dan memiliki villa tanpa pengawasan yang jelas."

Data BPS menunjukkan lonjakan jumlah wisatawan mancanegara hingga 6,3 juta pada 2024, diiringi peningkatan volume sampah dan kemacetan lalu lintas. Pada fase ini, masyarakat mulai merasakan tekanan lingkungan, meskipun resistensi masih bersifat laten dan belum terbuka. Secara lingkungan, volume sampah yang dihasilkan di Bali tergolong besar, diperkirakan mencapai ±3.436 ton per hari atau sekitar 1,2 juta ton per tahun, dengan tren peningkatan sekitar 30 % dari tahun 2000 hingga 2024, yang sebagian besar berasal dari aktivitas penduduk dan turis di kawasan padat kunjungan (Bali Post, 2025). Di sisi lain kemacetan lalu lintas menjadi dampak nyata dari *overtourism.*

Kabupaten/Kota	Banyaknya Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)
	2024
Kab. Jembrana	291.542
Kab. Tabanan	492.005
Kab. Badung	976.344
Kab. Gianyar	560.160
Kab. Klungkung	220.574
Kab. Bangli	154.075
Kab. Karangasem	274.251
Kab. Buleleng	526.741
Kota Denpasar	1.781.862
Provinsi Bali	5.277.554

Keterangan Data :

Sumber data: 1996-2021: Badan Pendapatan Provinsi Bali. Sejak 2022: Polda Bali.Tidak termasuk jenis kendaraan khusus/lainnya dan kendaraan yang tidak terpetakan.

Gambar 1. Banyaknya Kendaraan di Provinsi Bali

Menurut gambar 1 diatas bahwa data yang ditampilkan Bali memiliki jumlah kendaraan bermotor yang melebihi jumlah penduduknya, di mana pada 2024 jumlah kendaraan mencapai sekitar 5,2 juta kendaraan. Dimana Kota Denpasar adalah yang paling padat dengan mencapai perkiraan 1.781.862 kendaraan

3. Tahap *Annoyance*

Pada tahap *annoyance*, tekanan pariwisata semakin nyata dan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepadatan wisatawan di kawasan Canggu, Kuta, dan Ubud menyebabkan kemacetan, polusi suara, gangguan aktivitas ibadah, serta pelanggaran norma adat. Wawancara dengan Putu Fendi (5 November 2025) menunjukkan meningkatnya keresahan masyarakat:

"Banyak wisatawan asing menyewa motor tanpa memahami aturan berkendara, sering ugal-ugalan, dan membuat warga tidak nyaman."

Selain itu, keluhan dari Oka, pegawai restoran di Kerobokan (31 Oktober 2025), menegaskan ketimpangan distribusi ekonomi:

"Wisatawan terlalu terkonsentrasi di satu titik, ekonomi tidak merata, dan sering kali penduduk lokal justru diperlakukan tidak adil."

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah cenderung reaktif dan belum berbasis perencanaan jangka panjang, sehingga mempercepat transisi masyarakat menuju ketidakpuasan struktural.

4. Tahap *Antagonism*

Pada tahap *antagonism*, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Bali telah menunjukkan resistensi terbuka terhadap aktivitas pariwisata. Wisatawan mulai dipersepsikan sebagai sumber masalah sosial, budaya, dan lingkungan, sementara pemerintah dinilai gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan hak masyarakat adat. Gejala ini tercermin dari protes desa adat, pembatasan jam kunjungan wisata, serta penolakan aktivitas wisata di area sakral. Studi ini menegaskan bahwa masyarakat Bali, khususnya di wilayah dengan tingkat overtourism tinggi, telah memasuki fase antagonism yang ditandai oleh kelelahan sosial, ketidakpuasan kolektif, dan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih tegas dan berkeadilan.

Tabel 1. Hasil Penelitian Berdasarkan Doxey Irritation Index

Tahap *Doxey*	Karakteristik Utama	Temuan Lapangan
Euphoria	Antusiasme tinggi, sikap terbuka, pariwisata dipandang sebagai peluang ekonomi	Kebijakan promotif, perluasan lapangan kerja, belum ada pembatasan kunjungan
Apathy	Hubungan transaksional, tekanan lingkungan mulai terasa	Lonjakan wisatawan, peningkatan sampah dan kemacetan
Annoyance	Ketidaknyamanan meningkat, keluhan sosial dan budaya	Kepadatan ruang, pelanggaran norma adat, polusi suara
Antagonism	Resistensi terbuka, penolakan terhadap pariwisata	Protes desa adat, pembatasan kunjungan, konflik sosial

PEMBAHASAN

Doxey's Irritation Index atau Irridex adalah salah satu teori klasik yang menjelaskan perubahan sikap masyarakat lokal terhadap perkembangan pariwisata serta kehadiran wisatawan. Teori ini diperkenalkan oleh George V. Doxey pada tahun 1975, digunakan untuk memahami hubungan antara pertumbuhan pariwisata dan respons sosial masyarakat yang secara langsung terdampak dari adanya aktivitas ini. Teori ini akan semakin relevan jika pertumbuhan ekonomi pariwisata bergerak secara cepat dan tidak terkelola secara optimal. Tekanan tersebut dapat berupa meningkatnya kepadatan ruang, beban infrastruktur publik, degradasi lingkungan, serta perubahan pola interaksi sosial masyarakat lokal (Sutami, 2019).

Secara konseptual Irridex menekankan bahwa perubahan sikap masyarakat merupakan hasil dari dampak pariwisata dalam jangka panjang, dimana pengembangan pariwisata telah melampaui daya dukung wilayah dan kapasitas sosial masyarakat hal ini sering disebut dengan *overtourism*. *Overtourism* yaitu situasi ketika jumlah wisatawan dan aktivitas pariwisata melebihi kemampuan destinasi untuk menampungnya secara berkelanjutan (Milano et al., 2019).

Dalam perspektif kebijakan, *Doxey Irritation Index* memiliki fungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap kebijakan dan regulasi pariwisata. Ketika pertumbuhan wisata yang pesat bisa meningkatkan tekanan terhadap ruang, infrastruktur, dan lingkungan di destinasi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap perkembangan turisme di wilayah mereka (Putra & Santosa, 2024). Doxey Irritation Index memiliki empat indikator yaitu *Euphoria, Apathy, Annoyance, Antagonism.*

Pada tahap awal yaitu tahap *Euphoria* yakni dari perkembangan pariwisata, masyarakat lokal menyambut positif dan bersemangat menyambut kedatangan wisatawan, dimana pada

fase ini kontak antara penduduk asli dengan wisatawan masih bersifat informal dan belum ada perencanaan pariwisata yang kaku. Masyarakat melihat pariwisata sebagai sektor yang memberikan harapan besar bagi peningkatan ekonomi (N. Winata, 2023). serta terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor pariwisata, mulai dari perhotelan, restoran, kafe, transportasi, dan industri kreatif lainnya, pada tahap ini pariwisata dipersepsikan sebagai peluang ekonomi dan sumber kesejahteraan, sehingga kebijakan publik cenderung bersifat promotif dan berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan. Fase *euphoria* sering muncul di destinasi yang sedang berkembang, di mana manfaat ekonomi masih lebih dominan dibandingkan dampak sosial dan lingkungan (Nugraha, 2021). Maka dari itu disinilah pentingnya manajemen terhadap pengelolaan wisata mulai dari awal hingga juga kemenarikan terhadap masyarakat (Jazuli et al., 2023).

Terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas, mendorong pemerintah untuk memberdayakan tenaga lokal agar dampak ekonomi lebih merata. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat optimisme tersebut melalui kebijakan yang menekankan prioritas tenaga kerja lokal sebagaimana tercantum dalam Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang kemudian menjadi simbol legitimasi sosial atas ekspansi industri pariwisata, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, yang secara terus terang menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja.

Namun, tingginya semangat pembangunan pada fase euphoria tidak diiringi dengan regulasi pengendalian kunjungan wisatawan maupun standar kapasitas daya dukung lingkungan. Regulasi yang ada lebih bersifat fasilitatif dan promotif, bukan preventif. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kesiapan infrastruktur lingkungan-kesenjangan yang menjadi akar dari *overtourism* di tahun-tahun berikutnya (Sastrawan, 2021).

Pada fase ini, hubungan masyarakat–wisatawan bersifat harmonis, tetapi fondasi pengelolaan pariwisata masih lemah. Ketidaksiapan tersebut terlihat dari minimnya instrumen pengaturan jumlah wisatawan di daerah sensitif seperti Ubud dan Kuta, sehingga pertumbuhan kunjungan terus melampaui kapasitas ruang (Adnyana, 2023). Secara teoritis, tahap euphoria biasanya tidak bertahan lama ketika manfaat ekonomi tidak diimbangi pengaturan ruang, Doxey, 1975 dalam interpretasi modern (Sastrawan, 2021).

Memasuki tahap kedua, yakni tahap *Apathy*, mencerminkan kondisi ketika pariwisata telah menjadi aktivitas rutin dan terinstitusionalisasi. Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, interaksi yang awalnya bernuansa budaya berubah menjadi hubungan transaksional. Masyarakat mulai menempatkan wisatawan sebagai sumber pendapatan, bukan lagi tamu budaya (Sutami, 2019). Fenomena ini sesuai dengan fase apathy, di mana keterlibatan warga lebih diarahkan pada keuntungan ekonomi dan pelayanan wisata (Kurniawan & Rahmawati, 2013). Dari sisi regulasi, pemerintah cenderung merespons dengan menambah fasilitas dan membuka ruang investasi, tetapi tidak memperkuat instrumen pengendalian kunjungan maupun zonasi.

Pada periode ini, muncul tanda-tanda awal tekanan lingkungan: kemacetan, peningkatan volume sampah, dan tekanan pada sumber air bersih, terutama di wilayah destinasi padat seperti Canggu, Seminyak, dan Uluwatu (Darmayasa, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sepanjang 2024 mencapai sekitar 6,3 juta orang, meningkat dibanding sebelumnya yang sekitar 5.2 juta, sedangkan untuk 2025 sedang dalam periode berjalan, dan diperkirakan terus mengalami kenaikan. Dengan adanya peningkatan wisatawan yang semakin signifikan sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dampak pariwisata kedepannya. "Seharusnya pemerintah sudah berani mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tepat sebelum lonjakan wisatawan yang semakin tidak terkontrol, apalagi saat ini banyak sekali wisatawan mancanegara yang sudah memiliki villa di Bali tanpa adanya monitoring dari pemerintah itu sendiri", jelasnya dalam wawancara

Secara lingkungan, volume sampah yang dihasilkan di Bali tergolong besar, diperkirakan mencapai ±3.436 ton per hari atau sekitar 1,2 juta ton per tahun, dengan tren peningkatan sekitar 30 % dari tahun 2000 hingga 2024, yang sebagian besar berasal dari aktivitas penduduk dan turis di kawasan padat kunjungan (K. Winata, 2025). Di sisi lain kemacetan lalu lintas menjadi dampak nyata dari *overtourism*. Menurut data yang ditampilkan Bali memiliki jumlah kendaraan bermotor yang melebihi jumlah penduduknya, di mana pada 2024 jumlah kendaraan mencapai sekitar 5,2 juta kendaraan.

Fase *apathy* menunjukkan bagaimana ketidakmampuan regulasi beradaptasi dengan perubahan struktur interaksi wisatawan, dan masyarakat mulai memunculkan ketegangan ringan. Pada fase ini banyak masyarakat yang mulai merasakan bahwa kehadiran para wisatawan mancanegara ini bukan lagi hal yang perlu dibanggakan. Seperti wawancara yang

sempat dilakukan kepada Bapak Deduk sebagai salah satu pemilik villa yang ada di kawasan Batu Bolong "Saat ini bule yang datang ke Bali orientasinya bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk bekerja jadi seharusnya kita sebagai penduduk asli tidak perlu terlalu mengagung-agungkan bule yang datang ke Bali, selain itu pemerintah seharusnya juga sadar bahwa para bule ini sudah mulai menguasai ekonomi disini". Namun, pemerintah masih mempertahankan orientasi ekonomi tanpa membangun sistem monitoring kapasitas daya dukung lingkungan. Karena itu, fase apathy menjadi titik kritis yang memicu percepatan menuju fase berikutnya.

Pada tahap ketiga yakni tahap annoyance yang merupakan tahap dimana tekanan arus wisatawan mulai terasa, terutama terhadap ruang hidup, infrastruktur, dan norma sosial (Pradnyana, 2021). Hal ini terjadi ketika masyarakat mulai merasakan ketidaknyamanan akibat tingginya konsentrasi wisatawan pada titik tertentu (Putra & Santosa, 2024). Dalam konteks Bali, kawasan Kuta-Legian, Ubud Tengah, Pantai Pandawa, dan Canggu menunjukkan indikator kepadatan yang signifikan. Badan Pusat Statistik Bali mencatat peningkatan kepadatan ruang wisata hingga melampaui kapasitas layanan jalan dan sanitasi sejak 2019 (BPS Bali, 2022).

Keluhan masyarakat mulai muncul terkait gangguan aktivitas sehari-hari, seperti kemacetan, polusi suara, kepadatan di tempat ibadah, serta ketidaksopanan sebagian wisatawan yang tidak memahami norma adat Bali seperti wisatawan yang berpakaian tidak sopan saat berkunjung ke tempat ibadah atau tempat suci. Hal ini tercermin di mana jumlah kendaraan di Bali yang mencapai 5.2 juta unit pada tahun 2024 telah melampaui kapasitas jalan yang tersedia, khususnya di kawasan Bali Selatan (BPS Provinsi Bali, 2024). Menurut Bapak Putu Fendi sebagai masyarakat yang tinggal di Canggu menyatakan bahwa "Saat ini banyak sekali wisatawan mancanegara yang melakukan rental motor tanpa tahu aturan berkendara dan seringkali menyebabkan keresahan pada masyarakat lokal". Kondisi ini menciptakan kemacetan yang menghambat mobilitas warga lokal, yang kemudian semakin diperparah dengan keadaan polusi suara dari kelab malam di kawasan pemukiman warga. Fenomena ini tercermin dalam berbagai petisi publik yang sempat dikeluarkan, seperti yang terjadi di Canggu, yang menunjukkan bahwa aktivitas wisata mulai mengganggu ruang privat dan hak istirahat warga (N. Winata, 2023). Pemerintah Provinsi Bali bahkan menerbitkan pedoman dan aturan khusus bagi wisatawan sebagai respons atas meningkatnya kasus wisatawan yang tidak menghormati norma adat dan budaya lokal (Made Dwi, 2025).

Pada titik inilah lemahnya integrasi regulasi mulai terlihat jelas. Tidak adanya mekanisme pembatasan harian wisatawan, pembangunan yang berfokus di satu titik keramaian, memperburuk tahap *annoyance* di lingkungan masyarakat. Menurut Bapak Oka sebagai salah satu pegawai restoran di Kerobokan menyatakan bahwa "Terlalu banyak wisatawan yang berkumpul di satu titik tertentu menyebabkan putaran roda ekonomi di Bali tidak merata, selain itu saat ini banyak wisatawan asing yang bertindak semaunya sampai mendiskriminasi penduduk asli". Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan berbasis urgensi, bukan berbasis perencanaan jangka panjang (Pradnyana, 2021). Dalam kerangka Doxey, faktor-faktor ini mempercepat transformasi masyarakat dari ketidaknyamanan ringan menuju ketidakpuasan struktural.

Dan tahap terakhir yakni Tahap *Antagonism* merupakan tahap dimana masyarakat menunjukkan resistensi, bahkan penolakan terhadap kegiatan wisata (Milano et al., 2019). Wisatawan dipersepsikan sebagai penyebab utama permasalahan sosial dan lingkungan, sementara pemerintah dianggap kehilangan legitimasi dalam tata kelola pariwisata. Ketika *overtourism* mencapai titik kritis, masyarakat mulai menunjukkan indikasi *antagonism*, yaitu bentuk resistensi terbuka terhadap wisatawan (Pardede, 2024). Gejala fase ini dapat terlihat dari meningkatnya protes warga di beberapa desa adat, misalnya terkait aktivitas wisata yang mengganggu upacara adat atau merusak area sacral. Desa adat di kawasan Ubud Barat, misalnya, mulai mengajukan pembatasan jam kunjungan karena interaksi wisatawan dianggap mengganggu ritual harian (N. Winata, 2023). Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali sudah memasuki fase *antagonism*, dimana fase ini masyarakat sudah menyuarakan ketidakpuasan, kelelahan sosial, dan resistansi terhadap dampak dari *overtourism.*

Dalam konteks regulasi, fase antagonism memperlihatkan kegagalan kebijakan dalam mencegah konflik. Regulasi yang ada tidak mampu menjawab ketidakseimbangan antara hak masyarakat adat terhadap ruang budaya dan tuntutan industri pariwisata (Darmayasa, 2020). Minimnya koordinasi antara pemerintah daerah, desa adat, dan pelaku industri menyebabkan desa-desa tertentu mengalami tekanan ruang dan sosial yang tinggi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa respon masyarakat Bali terhadap pariwisata merupakan refleksi langsung dari efektivitas regulasi yang diterapkan. Tanpa pergeseran paradigma menuju pengelolaan pariwisata berbasis daya dukung dan keadilan sosial, Bali berisiko terjebak dalam siklus *antagonism* yang berkelanjutan (Milano et al., 2019). Implikasi teoretis dari pembahasan ini memperkuat relevansi *Doxey Irritation Index*

sebagai alat evaluasi kebijakan pariwisata, sementara implikasi praktisnya menuntut pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif, preventif, dan partisipatif agar hubungan antara masyarakat lokal dan pariwisata dapat kembali berada pada jalur yang berkelanjutan (Ramdani, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul *Regulasi Pariwisata dan Respon Masyarakat Bali: Analisis Doxey Irritation Index*, dapat disimpulkan bahwa pariwisata Bali saat ini berada pada fase kritis akibat fenomena *overtourism* yang berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dan tata kelola untuk mengendalikannya, khususnya di kawasan Bali Selatan. Mengacu pada kerangka *Doxey's Irritation Index*, respon masyarakat lokal menunjukkan pergeseran yang nyata dari tahap *euphoria* dan *apathy* menuju *annoyance* hingga *antagonism*, yang ditandai oleh meningkatnya ketidaknyamanan, kelelahan sosial, dan resistensi terbuka terhadap aktivitas wisata. Pergeseran ini dipicu oleh akumulasi tekanan fisik dan sosial berupa kemacetan kronis, degradasi lingkungan dengan tingginya timbulan sampah, polusi suara yang mengganggu ruang privat warga, serta pelanggaran norma adat dan kesakralan ruang budaya. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi pariwisata yang telah ditetapkan seperti Perda No. 10 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan dan Perda No. 6 Tahun 2023 tentang Tourist Levy dengan implementasinya di lapangan, yang tercermin dari rendahnya efektivitas kebijakan dalam mengatasi persoalan lingkungan dan sosial. Karakter kebijakan yang masih dominan reaktif dan berorientasi pada kuantitas kunjungan menunjukkan bahwa Bali berada dalam kondisi *tourism growth dependency*, di mana ketergantungan pada pertumbuhan wisata justru memperbesar risiko konflik sosial dan mengancam keberlanjutan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pariwisata yang integratif dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pengendalian daya dukung, penegakan hukum yang tegas, perlindungan ruang budaya, serta pelibatan aktif desa adat dalam pengambilan keputusan terkait zonasi dan kapasitas wisata, guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Bali.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam kajian pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam memahami hubungan antara regulasi pariwisata dan respon sosial masyarakat lokal di Bali. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi *Doxey Irritation Index* sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi dinamika sikap masyarakat dalam

konteks overtourism di destinasi berkembang, dengan menambahkan dimensi kebijakan dan implementasi regulasi sebagai faktor penentu percepatan pergeseran tahap respon masyarakat. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pariwisata yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berbasis daya dukung lingkungan serta sosial, dengan menempatkan masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam tata kelola pariwisata Bali.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Mengembangkan pendekatan *mixed methods* dengan mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif guna mengukur secara lebih presisi tingkat kejenuhan sosial masyarakat pada setiap tahapan *Doxey Irritation Index*, serta mengaitkannya dengan indikator kuantitatif seperti kapasitas daya dukung lingkungan, distribusi ekonomi pariwisata, dan kepatuhan wisatawan terhadap regulasi. 2) Memperluas cakupan wilayah hingga ke Bali Utara dan Bali Timur untuk memperoleh perbandingan spasial respon masyarakat, serta mengkaji secara lebih mendalam peran desa adat dan efektivitas implementasi kebijakan seperti *tourist levy* sebagai instrumen pembiayaan pariwisata berkelanjutan dan mitigasi dampak *overtourism*.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, I. B. (2023). Analisis Kapasitas Ruang Pariwisata di Kawasan Ubud. *Jurnal Destinasi Wisata, 1*(2), 88–102.

Darmayasa, A. (2020). Konflik Ruang antara Desa Adat dan Aktivitas Pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik, 5*(2), 77–90.

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of madrasah in cultivating Fastabiqul Khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *EDHJ Unnusa, 8*(April), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Koens, K., Postma, A., & Papp, B. (2018). Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. *Sustainability, 10*(12), 4384. https://doi.org/10.3390/su10124384

Kurniawan, A., & Rahmawati, D. (2013). Perkembangan Digitalisasi terhadap Sikap Masyarakat Kampung Adat Banceuy menurut Doxey Irritation Index. *Jurnal Pariwisata dan Budaya Lokal, 3*(1), 45–59.

Made Dwi. (2025). *Pemerintah Bali: Tertibkan Turis Asing yang Berulah di Bali, Gubernur Koster Keluarkan SE Nomor 7 Tahun 2025*. Pemerintah Bali. https://bmc.baliprov.go.id/news/title/tertibkan-turis-asing-yang-berulah-di-bali-gubernur-koster-keluarkan-se-nomor-7-tahun-2025

Milano, C., Novelli, M., & Cheer, J. M. (2019). Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development. *Tourism Planning & Development, 16*(4), 353. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604

Nugraha, F. (2021). *Shifting social interaction in tourism areas*. SAGE Publications.

Pardede, T. (2024). Local community based tourism village development strategy in Buluh Awar Tourism Village Deli Serdang District. *Media Wisata, 22*(1), 194–214. https://doi.org/10.36276/mws.v22i1.709

Prabawa, I. W. S. W., Suwintari, I. G. A. E., Semara, I. M. T., Effendie, M. W., & Pertiwi, P. R. (2025). Tourist's bizarre behaviors in Bali: Deconstruction of Irritation Index theory from Gen Z perspective. *Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, 6*(2), 348–357. https://doi.org/10.33649/pusaka.v6i2.464

Pradnyana, I. W. (2021). Karakter Reaktif Kebijakan Publik dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik, 13*(3), 122–137.

Putra, I. N. M., & Santosa, A. P. (2024). Perspektif Overtourism di Kawasan Wisata Canggu: Identifikasi Canggu di antara Euphoria dan Annoyance. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation, 1*(2), 122–125. https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/75762

Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 9*(2), 240–259. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110

Ramdani, D. (2025). Analysis of the impact of tourist visits on the culture of the community around the Batu Kuda tourist area, Bandung Regency. *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences, 3*(3), 851–869. https://doi.org/10.58578/ijhess.v3i3.6666

Sastrawan, B. (2021). *Reinterpretasi Konsep Doxey dalam Konteks Pariwisata Masa Kini*. Langka Publisher.

Sihombing, S. N. (2024). Urgensi Reformulasi Kebijakan Pariwisata Bali dalam Menjawab Tantangan Daya Dukung Lingkungan dan Sosial. *Jurnal Pacta Sunt Servanda, 1*(4), 129–137. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/5350

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.

Sutami, K. (2019). *Hubungan Transaksional dalam Interaksi Wisatawan–Masyarakat di Bali*. Decade Publisher.

Winata, K. (2025, August 9). *Timbulan Sampah di Bali Capai Jutaan Ton per Tahun, Daerah Ini Jadi Penyumbang Terbesarnya*. BALIPOST.com.

Winata, N. (2023). Respon Desa Adat terhadap Gangguan Aktivitas Wisata. *Jurnal Studi Budaya Nusantara, 4*(1), 59–71.